



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salman

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02 /2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengurus/Penyimpan Barang/Aset, terdiri dari:
 - a. PPKD/PA dan/atau KPA, PPK, PPTK, PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD/PPK Unit SKPD, Pejabat Penguji Tagihan, dan Penandatanganan SP2D, Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir (Khusus Badan Pendapatan Daerah), dan Staf Administrasi/Staf Pengelola/Pengawas Kegiatan;
 - b. Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud, dengan besaran didasarkan atas salah satu pagu dana tertinggi dari DPA yang dikelola.

- b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 5% (lima persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - c. Dalam hal bendahara pengeluaran telah di berikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- (3) Dalam hal sebagian kewenangan PA sudah dilimpahkan kepada KPA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka PA tidak mendapatkan honorarium, kecuali Dinas Kesehatan terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (4) dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran XXXI nomor 1 huruf B setelah angka 29 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

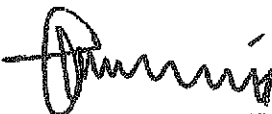
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

SATUAN BIAYA JASA DAN SEWA

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
A	Biaya Jasa Bidang Kesehatan		
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (PTT dan THL)	OB	4,960
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	OB	6,000
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (PTT dan THL)	OB	6,200
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non PNS	OB	7,500
5	Biaya Rapid Test dan sejenisnya	OK	250,000
6	Medical check up Pimpinan / Anggota DPRD	OK	1,500,000
7	Medical check up Wakil Bupati	Jiwa	30,000,000
8	Medical check up Bupati	Jiwa	40,000,000
9	Belanja Premi BPJS Kesehatan (Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) - Gaji s/d 2.500.000)	OB	100,000
10	Belanja Premi BPJS Kesehatan (Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) - Gaji 2.500.000 s/d 3.000.000)	OB	120,000
11	Belanja Premi BPJS Kesehatan (Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) - Gaji 3.000.000 s/d 4.500.000)	OB	180,000
12	Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Wakil Bupati)	OT	25,000,000
13	Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Bupati)	OT	35,000,000
14	Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Wakil Bupati)	Jiwa	37,324,000
15	Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Bupati)	Jiwa	55,986,500
16	Premi Asuransi Usaha Ternak (Usaha Sapi/Kerbau)	Ekor	40,000
B	Biaya Jasa Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Pengiriman		
1	Tagihan Air Sekolah Negeri Yayasan Sosial PantiPanti Asuhan (0-10M3)	M3	3,300
2	Tagihan Air Rumah Sakit Pemerintah Apotik Pemerintah LSM, Kantor Paspol, Rt Kelurahan (0-10M3)	M3	3,400
3	Tagihan Air Asrama/Mess milik Pemerintah, Sarana Instansi Pemerintah, Lembaga pemerintah lainnya, Kantor milik pemerintah, rumah dinas pejabat pemerintah kabupaten (0-10M3)	M3	3,850
4	Belanja Listrik Gol & indek tarif R1-4 (2200 VA)	VA	1,467
5	Belanja Listrik Gol & indek tarif R2-5 (5500 VA)	VA	1,467
6	Belanja Penambahan Daya (Tambah daya 5500 VA)	Lokasi	5,000,000
7	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk (Instalasi Gardu Listrik)	Paket	20,000,000
8	Belanja Jasa Pasang Jaringan Listrik (3500 W)	Paket	3,600,000
9	Belanja Jasa surat kabar/ majalah (Surat kabar mingguan)	Bulan	150,000
10	Belanja Jasa surat kabar/ majalah (Surat Kabar Harian Lokal)	Bulan	250,000
11	Belanja Jasa surat kabar/ majalah (Surat Kabar Harian Nasional)	Bulan	360,000
12	Belanja Jasa surat kabar/ majalah (Majalah/Tabloid)	Bulan	500,000
13	Belanja Jasa surat kabar/ majalah Majalah Kebencanaan	Tahun	750,000
14	Belanja Jasa surat kabar/ majalah (Surat Kabar Insidentil)	Kali	500,000
15	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Langganan Internet - 20Mbps)	Bulan	550,000
16	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Langganan Internet - 30Mbps)	Bulan	750,000

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
17	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Langganan Internet - 50Mbps)	Bulan	950,000
18	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Langganan Internet - 100Mbps)	Bulan	1,500,000
19	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Langganan Jasa Internet VPN)	Bulan	900,000
20	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Langganan Domain Aplikasi PAS)	Kegiatan	1,500,000
21	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Domain Aplikasi QR PPA)	Kegiatan	4,000,000
22	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Bandwith Internet - Akses Internet Fiber Optik Up to 50 Mbps Internasional dan Domestik - Akses Intranet Fiber Optik Up to 10 Mbps - Service Level Agreement (SLA) : 99%	Bulan	7,350,000
23	Belanja Jasa kawat/faksimili/ internet (Bandwith Internet - Akses Internet Dedicated Fiber Optik 300 Mbps Internasional dan Domestik - kapasitas Download dan Upload rasio 1:1 - Dynamic BGP Full Route - Service Level Agreement (SLA) : 99%	Bulan	40,162,500
24	Belanja Barang Software Aplikasi Tahunan (License Proxy)	Tahun	88,000,000
25	Belanja Sewa Hosting/Colocation Server (Biaya Sewa Virtual Machine Server)	Tahun	115,176,600
26	Belanja jasa pengiriman (cargo pameran tingkat nasional)	Kali	4,250,000
27	Belanja Jasa Pengiriman Surat (Dalam Kab. Bojonegoro)	Surat	10,000
28	Belanja Jasa pengiriman surat (Luar Kab. Bojonegoro)	Surat	20,000
29	Belanja Jasa pengiriman surat (Luar Kab. Bojonegoro)	Kg	20,000
30	Garansi Server LPSE	Unit	100,000,000
C	Biaya Jasa Sertifikasi		
1	Uji Sampel Darah Unggas	Sampel	20,000
2	Uji Laboratorium air bersih	Kali	250,000
3	Uji Darah Sapi	Sampel	290,000
4	Uji Laboratorium sampel pakan	Sampel	450,000
5	Uji Sampel Obat Non Injeksi	Sampel	11,160
6	Uji Lindi	Sampel	335,930
7	Uji Air Limbah Domestik	Sampel	2,500,000
8	Uji Air Badan Air	Sampel	300,000
9	Uji Air Bersih	Sampel	2,000,000
10	Uji Embung	Sampel	2,250,000
11	Uji Sampel Obat Injeksi	Sampel	2,250,000
12	Pemeriksaan Sampel SAB Pamsimas	Sampel	100,000
13	Test Kit Borax (Kit Uji Produk Hewan)	Sampel	50,000
14	Test Kit Formalin (Kit Uji Produk Hewan)	Sampel	50,000
15	Sertifikasi HKI (Hak Cipta)	Paket	700,000
16	Sertifikasi HKI (Merek)	Paket	800,000
17	Belanja Uji Laboratorium (Air Limbah)	Sampel	1,000,000
18	Belanja Uji Sertifikasi Kompetensi (BNSP)	Orang	1,000,000
19	Belanja Sertifikasi	Buku	2,500,000
20	Pemeriksaan Kimia Air Bersih	Kegiatan	2,500,000
21	Rapid Test Daging Babi (Uji Produk Hewan)	Sampel	50,000
22	Jasa Uji Sertifikasi di PPSDM Migas Cepu (Kementrian ESDM)	Orang	3,300,000
23	Sertifikasi Halal	Kali	4,000,000
24	Pemeriksaan Mikrobiologi Air Bersih	Kegiatan	4,560,000
25	Bahan Sampel untuk Uji Keamanan Pangan (Pangan Olahan dan Pangan segar)	LS	5,787,300
26	Belanja Sertifikat Tanah	Bidang	6,000,000
27	Belanja Jasa Analisa Laboratorium - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air Bersih	Kali	250,000

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
28	Belanja Jasa Analisa Laboratorium - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air Limbah	kali	2,000,000
29	Belanja jasa analisa laboratorium-pemantauan mutu Eksternal/PME	Kali	5,000,000
30	Jasa Uji Laboratorium Spesimen SHK konfirmasi Positif	buah	250,000
31	Pemeriksaan Sampel SAB Pamsimas	kali	500,000
32	Pemeriksaan sampel makanan minuman	kali	1,500,000
33	Pemeriksaan Malaria	kali	2,500,000
34	Pemeriksaan Kimia Air Bersih	kali	2,500,000
35	Pemeriksaan laboratorium Air Bersih (pemeriksaan mikrobiologi dan kimia air lengkap)	kali	4,560,000
36	Belanja Jasa Analisa Laboratorium (Jasa Uji PME)	Paket	5,200,000
D	Biaya Jasa Transaksi Keuangan		
1	Belanja jasa transaksi keuangan (Jasa transfer/Chaneling pembayaran pajak daerah)	Transaksi	6,500
2	Belanja jasa transaksi keuangan (Cek)	Lembar	12,000
3	Belanja jasa transaksi keuangan (pemindahan bukan RTGS)	Buah	75,000
4	Belanja jasa transaksi keuangan (Buku Cek)	bendel	300,000
5	Jasa Kontribusi SPPT PBB	Lembar	1,500
6	Honor Penagih Retribusi	OB	1,800,000
E	Belanja Jasa KIR		
1	Angkutan Orang dan Barang	Unit	125,000
2	Uji KIR	Unit	500,000
3	KIR Truck	UT	2,550,000
4	Her registrasi Kendaraan Dinas Roda 2	Paket	250,000
5	Her registrasi Kendaraan Dinas Roda 4	Paket	750,000
6	Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 2 (dua)	UT	300,000
7	Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 2 (dua)	UT	500,000
8	Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 2 (dua)	UT	700,000
9	Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 4 (Empat)	UT	2,000,000
10	Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 4 (Empat)	UT	3,000,000
11	Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 4 (Empat)	UT	5,000,000
12	Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 4 (Empat)	UT	7,000,000
13	Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 6 (Enam)	UT	4,500,000
F	Belanja Jasa Kantor Lainnya		
1	Belanja jasa Fumigasi Arsip (Dragnet 5.0/M3, Methil Bramida)	Bulan	52,000
2	Belanja jasa Laundry (Cuci Umbul-Umbul, Bendera, Rontek, Korden, Karpet, dll)	Kg	45,000
3	Belanja jasa Laundry (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)	Kg	200,000
4	Belanja jasa Pengurusan (Tandon air)	kali	219,000
5	Belanja jasa Pengurusan (Septictank)	kubik	436,000
6	Belanja jasa pemasangan baliho (Pasang Baliho)	buah	300,000
7	Belanja jasa dokumentasi foto dan video kegiatan (Dokumentasi dan Video kegiatan standart)	Paket	1,500,000
8	Belanja jasa dokumentasi foto dan video kegiatan (Video Profil Perpajakan Daerah, durasi min 3 Menit)	Paket	10,000,000
9	Belanja jasa dokumentasi foto dan video kegiatan (Dokumentasi dan Video kegiatan)	Paket	30,000,000
10	Belanja jasa Publikasi (Publikasi radio)	Paket	3,000,000
11	Belanja jasa Publikasi (Publikasi media cetak)	kali	3,000,000
12	Belanja jasa Publikasi (Publikasi media cetak nasional)	paket	60,000,000
13	Belanja jasa Publikasi (Iklan layanan masyarakat, media elektronik)	Paket	50,000,000
14	Belanja jasa Publikasi (Jasa Publikasi Melalui Media Ciber)	MK	700,000
15	Belanja jasa Publikasi (Jasa Iklan Di Media Online)	Paket	3,000,000
16	Belanja jasa Publikasi (Jasa penayangan di televisi)	Paket	50,000,000

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
17	Belanja jasa Publikasi (Jasa Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat)	Paket	10,000,000
18	Belanja jasa Publikasi (Jasa Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat Elektronik)	Paket	30,000,000
19	Belanja jasa karangan bunga (lokal)	Buah	1,000,000
20	Belanja sewa space iklan baliho (lokasi desa)	PB	6,425,000
21	Belanja sewa space iklan baliho (lokasi kota)	PT	20,000,000
22	Belanja Iuran (Asosiasi Pemerintah Kab/Kota se Indonesia APKASI) (iuran anggota APKASI)	Tahun	25,000,000
G	Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat		
1	Sewa Gedung/Kantor/ Tempat (ruang pertemuan)	Hari	1,500,000
2	Sewa Gedung/Kantor/ Tempat (Gedung)	Hari	5,000,000
3	Sewa Hotel Tamu Pemkab (Biasa)	KH	700,000
4	Sewa Hotel Tamu Pemkab (VIP)	KH	980,000
5	Sewa Hotel Tamu Pemkab (VVIP)	KH	3,000,000
H	Biaya Sewa Meja Kursi		
1	sewa kursi	Buah	5,000
2	sewa kursi bahan busa	Buah	10,000
3	sewa meja plastik	Buah	10,000
4	sewa meja kayu	Buah	20,000
I	Biaya Sewa Lainnya		
1	Sewa Tenda	Set	1,300,000
2	Sewa Pakaian Adat	Stel	200,000
3	Dekorasi Kegiatan sedang	Unit	3,000,000
4	Dekorasi Kegiatan luas	Unit	5,000,000
5	Dekorasi Kegiatan Dekorasi pameran, Kecil	Paket	6,000,000
6	Dekorasi Kegiatan Dekorasi pameran, Sedang	Paket	16,000,000
7	Dekorasi Kegiatan Dekorasi pameran, Besar	Paket	35,000,000
9	Sewa AC	UH	800,000
10	Dekorasi taman ukuran kecil dalam ruangan	Paket	1,000,000
11	Sewa Internet Dedicated	UH	2,114,000
12	Sewa Panggung	Paket	2,500,000
14	Sewa Sound System	Paket	2,500,000

Keterangan :

UH : Unit/Hari

KH : Kamar/Hari

PB : Paket/Bulan

PT : Paket/Tahun

MK : Media/Kegiatan

UT : Unit/Tahun

OB : Orang/Bulan

OK : Orang/Kegiatan

OT : Orang/Tahun

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001